

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI NAGARI
LIMO KAUM PADA TAHUN 2021)**

Oleh : Naufal Syauqi AR

Pembimbing: Wazni

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar di dalam data terpadu sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk membantu di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Nagari Limo Kaum adalah nagari yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan untuk membantu serta meningkatkan taraf hidup masyarakat atau keluarga penerima manfaat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pada Tahun 2021, jumlah KPM di Nagari Limo Kaum meningkat yang mana seharusnya menurun dikarenakan anak sekolah atau kriteria penerima manfaat berkurang setiap tahunnya. Di dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan teori implementasi dari Marilee S.Grindle dalam Subarsono(2005).

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah primer yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kemudian lokasi penelitian di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan atau PKH yang ada di Nagari Limo Kaum dapat dikatakan sesuai dengan peraturan Kementerian serta tepatnya sasaran bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan. Untuk peningkatan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapat kan bantuan di Nagari Limo Kaum terjadi akibat dampak dari pandemic Covid-19 yang mana terjadinya guncangan ekonomi masyarakat Nagari Limo Kaum. Terutama bagi lansia dan pendidikan anak-anak sekolah. Oleh karena itu, jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari PKH (Program Keluarga Harapan) Nagari Limo Kaum meningkat. Ketepatan sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) Nagari Limo Kaum telah dilaksanakan dan diantisipasi melalui kegiatan yang rutin dilakukan tiap bulannya oleh Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk melakukan kegiatan administratif dan edukatif serta meminta informasi kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a program that provides conditional social assistance to poor families registered in integrated data as beneficiary families (KPM) with the aim of assisting in improving the quality of human resources. This program is implemented by the Ministry of Social Affairs in Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. Nagari Limo Kaum is a nagari that receives assistance from the Family Hope Program (PKH) with the aim of helping and improving the standard of living of the community or beneficiary families through education, health and social welfare services. In 2021, the number of KPM in Nagari Limo Kaum will increase, which should have decreased because school children or the criteria for beneficiaries decrease every year. In achieving research objectives, researchers used implementation theory from Marilee S. Grindle in Subarsono (2005).

The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. Then the research location was Nagari Limo Kaum, Lima Kaum District, Tanah Datar Regency, West Sumatra.

The implementation of the KeluargaHarapan Program or PKH in Nagari Limo Kaum can be said to be in accordance with Ministry regulations and is precisely targeted at the people who receive assistance. The increase in the number of KPM (Beneficiary Families) who received assistance in Nagari Limo Kaum occurred due to the impact of the Covid-19 pandemic which caused an economic shock to the Nagari Limo Kaum community. Especially for the elderly and school children. Therefore, the number of KPM (Beneficiary Families) from PKH (Family Hope Program) Nagari Limo Kaum has increased. The accuracy of the PKH (Family Hope Program) Nagari Limo Kaum targets has been implemented and anticipated through routine activities carried out every month by PKH (Family Hope Program) Facilitators to carry out administrative and educational activities as well as request information from KPM (Beneficiary Families).

Keywords: Implementation, Policy, Family Hope Program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini, masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju, sehingga dampak dari kemiskinan ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan rendahnya pendidikan, pengangguran, gizi buruk, keterampilan dan lain-

lain. Dampak di atas merupakan salah satu faktor internal yang ada pada keluarga miskin. Faktor internal inilah yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk mengubah kondisi masyarakat kurang mampu menjadi lebih baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Indonesia telah berupaya menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin yang ada di Indonesia

meningkat pada September 2020 sebesar 10.19% dengan jumlah penduduk sebesar 27,55 juta orang. Hal tersebut juga merupakan angka yang cukup tinggi untuk mengatasi kemiskinan. Ada dua proses dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disepakati, yaitu mengimplementasikannya secara langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan yang diturunkan dari kebijakan publik tersebut.

Program adalah sesuatu yang berisi kegiatan atau pernyataan berupa harapan atau tujuan yang saling berkaitan. Sebuah program seringkali dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain. Langkah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dimulai dengan sebuah program. Program tersebut lahir dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat dengan baik untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Landasan hukum dari adanya Program Keluarga Harapan ini adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan ini adalah untuk mengurangi angka dan memutuskan

rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Program keluarga harapan tersebut memiliki sumber pendanaan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 57 yang menyebutkan, sumber pendanaan program keluarga harapan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Nagari Limo Kaum merupakan desa yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang memiliki cagar budaya yaitu Batu Batikam yang terletak di Dusun Tuo. Batu Batikam tersebut merupakan simbol perdamaian antara pemimpin pemerintahan pada masa itu. Batu Batikam adalah sebuah benda keras atau batu yang memiliki tusukan ditengahnya, yang mana diyakini oleh masyarakat setempat merupakan bekas tusukan keris milik Datuk Parpatiah Nan Sabatang yang pada saat itu mengalami perselisihan dengan Datuk Katumanggau mengenai pola pemerintahan pada masa itu. Batu Batikam menjadi salah satu bukti adanya kerajaan Minangkabau dan juga melambangkan pentingnya perdamaian dan musyawarah mufakat di lingkungan masyarakat Minangkabau.

Dengan adanya perselisihan yang terjadi antara

pemerintah dahulu, menjadikan suatu pelanjutan bagi masyarakat untuk menjadikan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan termasuk didalam pemerintahan. Di Kecamatan Lima Kaum memiliki cukup banyak keluarga yang

mendapatkan bantuan dari PKH tersebut pada tahun 2020. Adapun jumlah kartu keluarga yang menerima bantuan pada tahun 2020, di Kecamatan Lima Kaum dari Program Keluarga Harapan :

Tabel 1. 1 Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Lima Kaum Tahun 2020

NO	Nama Nagari	Jumlah Bantuan PKH
1	Baringin	158KK
2	Cubadak	72 KK
3	Labuh	126 KK
4	Limo Kaum	173 KK
5	Parambahan	79 KK
	Total	608 KK

Sumber : Pendamping PKH Nagari Lima Kaum Tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat di Kecamatan Lima Kaum memiliki 608 KK pada tahun 2020. Dan disetiap nagarinya memiliki lebih dari 50 KK yang mendapatkan bantuan PKH. Dari tabel diatas dapat terlihat Nagari Limo Kaum berada pada posisi terbanyak dengan jumlah penerima manfaat bantuan PKH sebanyak 173 KK.

Berdasarkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yaitu memiliki 7 jorong. Berikut daftar nama jorong beserta keluarga yang mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2020 :

Tabel 1.2 Daftar Nama Jorong di Nagari Limo Kaum Tahun 2020

NO	Nama Jorong	Jumlah Bantuan PKH
1	Balai Batu	12 KK
2	Balai Labuah Atas	7 KK
3	Balai Labuah Bawah	16 KK
4	Dusun Tuo	25 KK
5	Koto Gadih	8 KK
6	Kubu Rajo	39 KK
7	Piliang	58 KK
8	Tigo Tumpuak	9 KK
	Total	174 KK

Sumber : Pendamping PKH Nagari Lima Kaum Tahun 2020

Dapat dilihat melalui tabel diatas, penerima bantuan bersyarat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Nagari Limo Kaum pada tahun 2020 berjumlah 174 kartu keluarga. Di nagari tersebut termasuk nagari yang menerima bantuan dari PKH dengan kartu keluarga terbanyak. Pada tahun 2021, jumlah keluarga yang menerima bantuan dari PKH

meningkat dari tahun 2020. Meningkatnya penerima bantuan PKH tersebut, menandakan banyaknya masyarakat yang berkategori miskin dan lulus bersyarat untuk mendapatkan bantuan PKH. Berikut adalah table perbandingan penerima bantuan PKH pada tahun 2020-2021 di Nagari Limo Kaum :

Tabel 1.3 Perbandingan Data Penerima PKH di Nagari Lima Kaum Tahun 2020-2021

No	Nama Jorong	Jumlah PKH 2020	Jumlah PKH 2021
1	Balai Batu	12 KK	14 KK
2	Balai Labuah Atas	7 KK	9 KK
3	Balai Labuah Bawah	16 KK	19 KK
4	Dusun Tuo	25 KK	27 KK
5	Koto Gadih	8 KK	11 KK
6	Kubu Rajo	39 KK	39 KK
7	Piliang	58 KK	96 KK
8	Tigo Tumpuak	9 KK	10 KK
	Total	174 KK	225 KK

Sumber : Pendamping PKH Nagari Lima Kaum Tahun 2020-2021

Dari tabel diatas, jumlah dari tahun 2020 hingga 2021 jumlah keluarga yang mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan meningkat dengan jumlah 225 keluarga pada tahun 2021. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Nagari Limo Kaum, seharusnya penerima bantuan tiap tahunnya berkurang dikarenakan tiap tahun banyak anak yang telah lulus sekolah menengah atas.

Pemerintah sebagai aktor yang berperan penting untuk mencapai tujuan masyarakat Indonesia salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya telah direalisasikan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, Nagari Limo Kaum adalah salah satu nagari yang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan tersebut.

Dari nagari yang ada di kecamatan Limo Kaum, Nagari Limo Kaum termasuk nagari yang memiliki jumlah keluarga yang meningkat untuk mendapatkan bantuan dari PKH pada tahun 2020-2021 diantara nagari-nagari lainnya yang ada di Kecamatan Limo Kaum.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis mendapatkan fenomena :

1. Nagari Limo Kaum adalah nagari yang paling banyak keluarga yang mendapatkan bantuan dari PKH tersebut di Kecamatan Limo Kaum diantara

nagari lainnya. Dari 2020-2021, jumlah keluarga yang mendapat bantuan meningkat, padahal sesuai dengan observasi seharusnya penerima berkurang dikarenakan banyak pelajar sekolah menengah atas yang telah menyelesaikan pendidikannya dan sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan.

2. Tidak tepat sasaran dan meningkat nya jumlah keluarga membuat pertanyaan besar apakah validasi data penerima bantuan PKH di Nagari Limo Kaum transparan atau sesuai dengan persyaratan yang ada. Dan fenomena yang ditemukan adalah kebenaran validasi data penerima bantuan yang ada di Nagari Limo Kaum tersebut, apakah telah tepat pada sasaran atau sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Rumusan Masalah

Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial (Studi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Nagari Limo Kaum Pada Tahun 2021)

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini. Maka yang menjadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial (Studi Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan di Nagari Limo Kaum Pada tahun 2021).

Manfaat penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan tentang Program Keluarga Harapan

2. Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pedoman dalam melihat Implementasi Program Keluarga Harapan.

Kajian Teori

Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel yang menyangkut dengan isi kebijakan tersebut mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1)

seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan tergantung kepada hasil akhir. Yaitu tercapainya atau tidak tujuan dari kebijakan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Gerindle sebagai berikut: "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program tersebut tercapai."

Proses dalam pengimplementasian suatu kebijakan, dinilai sangat dapat mempengaruhi apakah suatu kebijakan yang menghasilkan program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam proses berjalannya suatu kebijakan dinyatakan berjalan jika ada implementator atau aktor yang menjalankan suatu kebijakan serta bertanggung jawab penuh atas kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan dibuat tentu memiliki sasaran yang memerlukan impact dari adanya kebijakan tersebut dengan melibatkan aktor aktor yang kompeten sehingga kebijakan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial (Studi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Nagari Limo Kaum Pada Tahun 2021)

Nagari Limo Kaum adalah Nagari yang ada di tercatat sebagai Nagari yang menerima manfaat yang mana meningkat pada tahun 2020-2021. Sebagai Nagari yang terletak dengan Ibu Kota Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Darar, Limo Kaum memiliki Jumlah keluarga miskin yang cukup banyak.

Keluarga yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut telah terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS yang mana data tersebut pada dasarnya adalah pengusulan menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bantuan dari Kementerian Sosial RI. Artinya setiap lurah atau kepala desa dapat mengusulkan masyarakat yang tidak mampu untuk masuk kedalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) mengakses bantuan. Dengan adanya prosedur untuk mengajukan data dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) , dapat membantu menyaring mana keluarga yang tepat sasaran untuk mendapatkan bantuan sosial.

Pada tahun 2021, telah tercatat masyarakat Nagari Limo Kaum yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Limo Kaum sebanyak 980 Keluarga. Hal ini menjadi peningkatan masyarakat miskin yang ada di Nagari Limo Kaum. Meningkatnya jumlah angka bagi keluarga yang mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang ada di Nagari Limo Kaum. Dengan penduduk yang dikatakan cukup banyak, Nagari Limo Kaum yang

terletak di ibu kota kecamatan ini memiliki jumlah angka keluarga yang mengusulkan kepada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk mendapatkan bantuan sosial.

Berdasarkan data DTKS, jumlah masyarakat yang terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) cukup banyak dengan jumlah 980 keluarga dan 3.008 individu. Dan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada tahun 2021 adalah 225 Keluarga.

1. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

1.1 Sejauh Mana Kepentingan Sasaran Kelompok/ Target Group Termuat Dalam Isi Kebijakan

Nagari Limo Kaum telah menerapkan program dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan PKH (Program Keluarga Harapan) dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi keluarga miskin dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan hidup keluarga. Terimplementasinya program yang diusulkan oleh Kementerian tersebut telah terlaksana di Nagari Limo Kaum berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang mana KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Keluarga Harapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan keluarga serta mengurangi beban dari bidang pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial yang ada di Nagari Limo Kaum.

Keluarga miskin merupakan kelompok yang menjadi sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga keluarga/seseorang yang rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Dengan memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial yang kurang. Pemerintah Nagari Limo kaum adalah aktor yang berperan dalam menjaring masyarakat/keluarga miskin untuk dapat mengakses data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kriteria komponen KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan kriteria komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kriteria komponen pendidikan terdiri dari anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan anak sekolah atas. Sedangkan kriteria komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat. Kriteria komponen tersebut adalah kriteria bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

Berkenaan dengan hal tersebut, Gusriah sebagai Wali Nagari Limo Kaum mengatakan bahwa :

“Program Keluarga Harapan ini merupakan program dari Kementerian yang mana tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin. Sebagai pemerintah Nagari Limo Kaum tugas dan fungsi untuk membantu program Kementerian dengan baik dan lancar adalah membantu masyarakat miskin untuk mendaftarkan sebagai calon

penerima manfaat dalam DTKS. Mendaftarkan masyarakat miskin tersebut, guna untuk menjaring mana yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui aturan perundang undangan”. (Wawancara, 24 September 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Limo Kaum, sasaran bagi PKH (Program Keluarga Harapan) adalah untuk keluarga/masyarakat miskin yang ada di Nagari Limo Kaum dan mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Masyarakat yang telah lulus dan tahap validasi data melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), akan dipilih menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Adanya program PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilaksanakan di Nagari Limo Kaum tentunya untuk mengatasi keterbatasan dibidang pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Manfaat yang didapatkan atau yang diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah berupa bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan), pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) , pelayanan fasilitas dari kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan sosial, arahan hingga sosialisasi edukasi dari pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).

1.2 Jenis Manfaat Yang Diterima Oleh Target Group

Keluarga atau yang telah dinyatakan sebagai peserta dari

Program Keluarga Harapan memiliki hak, diantaranya adalah :

1. Menerima bantuan tunai
2. Menerima pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi di puskesmas, posyandu, polindes dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan di Nagari Limo Kaum digunakan berdasarkan kategori Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan. Dan yang membagikan bantuan dana Program Keluarga Harapan di Nagari Limo Kaum oleh Menteri Sosial melalui petugas salur yaitu Bank Himbara dan PT Pos dengan jumlah dana bantuan yang diterima oleh keluarga telah disesuaikan berdasarkan kategori dari Program Keluarga Harapan.

Banyak dikhawatirkan oleh masyarakat terkait program yang menyangkut bantuan sosial, dikarenakan tidak tepatnya sasaran yang diberikan. Menghindari hal tersebut, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Wali Nagari hingga pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) akan melaksanakan koordinasi penuh atas terselenggaranya PKH (Program Keluarga Harapan).

1.3 Sejauh Mana Perubahan Yang Diinginkan Dari Sebuah Kebijakan

Tujuan adanya PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di Nagari Limo Kaum :

1. PKH (Program Keluarga Harapan) diharapkan untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan keluarga/masyarakat miskin yang ada di Nagari Limo Kaum
2. Menciptakan perubahan dari perilaku, pola pikir dan kemandirian keluarga/masyarakat miskin yang ada di Nagari Limo Kaum
3. Mengurangi beban keluarga miskin dengan adanya bantuan sosial dari pelayanan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial
5. Memperkenalkan manfaat produk dari jasa/keuangan formal.

Adanya PKH (Program Keluarga Harapan) tentu memiliki sasaran yang akan dituju dan dipertanggung jawabkan apakah telah terealisasi dengan benar. PKH (Program Keluarga Harapan) memiliki Pendamping yang ada di tingkat desa/kelurahan yang langsung memfasilitasi keluarga/masyarakat miskin. Oleh karena itu, Nagari Limo Kaum memiliki Pendamping Nagari yang mana memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pertemuan kelompok yang rutin dilakukan setiap bulan dengan penerima manfaat.

Adanya Program Keluarga Harapan yang terealisasi di Nagari Limo Kaum, memiliki perubahan terhadap masyarakat. Yang mana berdasarkan data meningkat pada peserta, namun dapat membantu kesejahteraan masyarakatnya. Diantara perubahan yang terjadi pada masyarakat Nagari Limo Kaum adanya Bantuan Non Tunai yang mana dana yang disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan. Dengan itu masyarakat memiliki kemampuan untuk membuka rekening tabungan didalam mengambil dana bantuan. Perubahan lainnya adalah dana yang digunakan oleh masyarakat adalah digunakan untuk diputar kembali menjadi modal usaha. Hal ini tercermin dari berhasilnya pendamping Program Keluarga Harapan dalam merubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menggunakan dana yang ada.

1.4 Apakah Letak Sebuah Program Sudah Tepat

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 49 berbunyi, Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) bertujuan memastikan anggota KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) sebagaimana

dimaksud dilakukan oleh pendamping sosial melaksanakan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) bagi Keluarga Penerima Manfaat paling sedikit satu kali setiap bulannya. Dan juga memfasilitasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) mendapatkan program bantuan.

Pertemuan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping Nagari Limo Kaum juga diikutsertakan oleh Koordinator Kabupaten. Berkenaan dengan hal tersebut, Rio Wardi,A.Md sebagai Koordinator Kabupaten Tanah Datar mengatakan bahwa:

“ untuk laporan bulanan, melakukan koordinasi dengan pendamping Nagari serta memonitoring setiap bulannya kelapangan. Yang dilakukan adalah sosialisasi dan koordinasi dengan koordinator kecamatan dan pendamping nagari agar PKH tepat pada sasarannya”. (wawancara, 24 september 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, realisasi PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di Nagari Limo Kaum berjalan dengan koordinasi yang baik antara Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Pendamping Nagari. Tingginya tingkat partisipasi pelaksana PKH (Program Keluarga Harapan) seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup keluarga/masyarakat miskin, dengan adanya strategi atau usaha untuk menanggulangnya.

1.5 Apakah Telah Menyebutkan Implementatornya

Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH (Program Keluarga Harapan), pada pasal 10 telah menyebutkan implementator yang memiliki tugas dan fungsi didalam menjalankan PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di Nagari Limo Kaum, penulis telah melakukan penelitian kepada

implementator yang menjadi aktor yang terlibat dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan. Yang mana masing-masing memiliki tugas dan fungsi nya masing untuk mendukung terselenggaranya PKH yang ada di Nagari Limo Kaum.

Berikut adalah tugas dan fungsi dari aktor atau sumber daya manusia yang menyelenggarakan PKH di Nagari Limo Kaum :

Tabel. Tugas Dan Fungsi Aktor Yang Menyelenggarakan PKH Yang Ada Di Nagari Limo Kaum

No	Instansi	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar	Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Memberikan dorongan dan arahan kepada pendamping PKH untuk meningkatkan kapasitas SDM serta memastikan pelaksanaan PKH tepat sasaran
2.	Kabupaten Tanah Datar	Koordinator PKH Kabupaten Tanah Datar	Membantu Kepala Dinas sosial kabupaten untuk mengkoordinir pendamping sosial PKH kabupaten
3.	Kecamatan Lima Kaum	Koordinator PKH Kecamatan Limo Kaum	Membantu mengkoordinir pendamping PKH dalam melakukan pertemuan ditingkat kecamatan
4.	Nagari Limo Kaum	Pendamping PKH Nagari Limo Kaum	Melakukan pendampingan kepada KPM PKH secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan ditingkat kecamatan.

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2023

Dalam pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) yang terlaksana, memiliki sumber daya manusia yang telah ditetapkan tugas dan fungsinya didalam peraturan Kementerian. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program

Keluarga Harapan, pasal 10 telah menyebutkan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh direktur untuk menangani pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan). Di Nagari Limo Kaum, sumber daya manusia yang menjalankan terlaksananya PKH (Program

Keluarga Harapan) terdiri dari Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), Koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) Kecamatan Lima Kaum, Koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar. Aktor-aktor tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Nagari Limo Kaum.

Sumberdaya yang terlibat dalam pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut melakukan pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) baik dari kegiatan administratif, melakukan pertemuan dan evaluasi kelompok, dan melaksanakan program lainnya yang telah ditetapkan dalam Kementerian.

2. Implementasi Kebijakan (Context Of Implementation)

2.1 Besar Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Suatu kebijakan yang akan diimplementasikan tentu telah melalui prosedur dari strategi hingga sasaran kepentingan dalam merealisasikannya. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi keluarga miskin yang ada diseluruh Indonesia. Nagari Limo Kaum adalah nagari yang mendapatkan bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut. Meningkatnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Nagari Limo Kaum disebabkan

karena dampak dari pandemi covid-19. Guncangan ekonomi hampir dirasakan semua orang, termasuk keluarga yang ada di Nagari Limo Kaum. Berdasarkan hal tersebut, demi terimplementasinya PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di Nagari Limo Kaum dapat tepat pada sasarannya, Nagari Limo Kaum memiliki Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Adapun tugas dan fungsi dari pendamping PKH Nagari Limo Kaum sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan administratif dan edukatif terkait aturan atau regulasi PKH (Program Keluarga Harapan) terbaru kepada Keluarga Penerima Manfaat
2. Melakukan pertemuan kelompok kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang rutin dilakukan setiap bulannya
3. Membantu meminta informasi kepada KPM (Keluarga Penerima Harapan) tentang perubahan data yang terjadi di keluarga KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
4. Melaksanakan P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang mana bertujuan untuk memberikan informasi dan materi kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Contoh materi yang diberikan adalah mengenai pengasuhan

anak, perlindungan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, dan kesejahteraan sosial.

Dari tugas dan fungsi pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut, terlihat bahwa pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) adalah implementator yang langsung terjun dan bertemu masyarakat di lapangan. Dengan adanya pertemuan kelompok P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang dilaksanakan rutin setiap bulannya, membuat Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) lebih tahu dan mengenal bagaimana kriteria keluarga yang mendapat manfaat.

2.2 Karakteristik Institusi Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yakni lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Maka karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. PKH (Program Keluarga Harapan) yakni program Kementerian yang dilaksanakan kepada kelompok atau keluarga miskin bersyarat untuk membantu perekonomian dan kesejahteraannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH (Program Keluarga Harapan) telah diatur untuk memberikan arahan, manfaat pelaksanaan hingga rezim yang mengawasi pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan)

tersebut. Didalam pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) aktor yang menjalani pelaksanaan kegiatan tersebut adalah orang pilihan yang telah memahami alur dalam pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan).

Di Nagari Limo Kaum, Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) adalah aktor yang paling dekat interaksinya dengan masyarakat atau keluarga miskin yang mendapatkan manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Karakteristik untuk membentuk pola pemikiran dan kemandirian bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) telah dimiliki oleh Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Melalui pertemuan dan interaksi yang dilakukan secara langsung dapat membantu melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya mengenai KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Kejujuran dan loyalitas yang diberikan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilakukan setiap pertemuan dilakukan dengan tujuan dapat membantu memberikan pengetahuan edukatif terkait manfaat yang diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Disisi lain, tentu aktor yang menjalankan program dari Kementerian ini memiliki kendala dalam membantu mengakses masyarakat yang menerima bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut. dengan adanya kendala tersebut, dengan segera memberikan kebijakan tegas kepada para KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Misalnya, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak mengikuti kegiatan dari PKH

(Program Keluarga Harapan) secara rutin, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang pindah domisili dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak memungkinkan untuk menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

2.3 Tingkah Kepatuhan Dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di Nagari Limo Kaum tentunya ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak semuanya namun ada beberapa yang menyalahgunakan bantuan tersebut. Ditengah keberagaman masyarakat, tentunya ada kendala yang dihadapi yang terjadi dalam pertemuan kelompok bagi masyarakat yang diadakan setiap bulannya. Oleh karena itu, Koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) Kecamatan Lima Kaum bersama pendamping membuat kebijakan atau aturan bagi masyarakat yang tidak mengikuti PKH (Program Keluarga Harapan) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kendalanya adalah:

1. Adanya Keluarga Penerima Manfaat yang tidak hadir dalam pertemuan yang diadakan setiap bulannya
2. Adanya Keluarga Penerima Manfaat yang pindah domisili sehingga tim PKH (Program Keluarga Harapan) sulit dalam proses administrasi
3. Adanya keluarga yang tidak memenuhi syarat,

sehingga otomatis untuk dikeluarkan dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Kendala kendala tersebut cukup menghambat prosedur didalam pertemuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang diadakan tiap bulannya. Oleh karena itu, Koordinator Kecamatan PKH (Program Keluarga Harapan) Lima Kaum dan pendamping memutuskan untuk otomatis mengeluarkan masyarakat yang tidak memenuhi syarat, tidak mengikuti pertemuan selama 3 kali berturut-turut dan untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang pindah domisili. Dengan adanya dampak dari pandemi, tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian masyarakat akan terganggu. Nagari Limo Kaum memperlihatkan kenaikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang ada di Nagari Limo Kaum pada tahun 2021, dikarenakan dampak dari pandemi.

Terutama kehidupan lansia, pendidikan anak-anak sekolah hingga kesehatan yang saat itu harus dijaga penuh ditengah virus covid-19. Dan dapat dikatakan kenaikan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terjadi akibat dampak pandemi, yang tidak bisa dihindari.

Dengan adanya PKH (Program Keluarga Harapan) ini, memungkinkan untuk masyarakat yang menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dapat mengambil kelebihan baik dari bantuan dan pelayanan yang diberikan agar dapat menjadi kesehatan dengan baik, tercukupinya pendidikan anak-anak yang ada di

Nagari, dan terjaganya ibu hamil dan menyusui. Hal tersebut tentu tidak lain untuk melindungi masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan melahirkan generasi bangsa yang akan melanjutkan menjadi pemimpin Negara ini.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan atau PKH yang ada di Nagari Limo Kaum dapat dikatakan sesuai dengan peraturan Kementerian serta tepatnya sasaran bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan. Dan untuk peningkatan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapatkan bantuan di Nagari Limo Kaum terjadi akibat dampak dari pandemic Covid-19 yang mana terjadinya guncangan ekonomi masyarakat Nagari Limo Kaum. Terutama bagi lansia dan pendidikan anak-anak sekolah. Oleh karena itu, jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari PKH(Program Keluarga Harapan) Nagari Limo Kaum meningkat. Tepatnya sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) Nagari Limo Kaum telah dilaksanakan dan di antisipasi melalui kegiatan yang rutin dilakukan tiap bulannya oleh Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk melakukan kegiatan administratif dan edukatif serta meminta informasi kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk perubahan data yang terjadi dikeluarga mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tidak tepatnya sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: alfabeta*.
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 2(1), 29-38.
- Ibrahim, Amin. (2013). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Refika Aditama.
- Jones, Charles O. (1984). *Pengantar Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif*. LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Retrieved from <http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar
- Subarsono. (2011). *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Refika Aditama..
- Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7
- Tachjan, Dr. H, M.Si. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Jurnal**
- Agus.S.(2013). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*.Jurnal Wacana, Vol.16.No.2
- B.S.Tlonaen, Yudid, Williy Tri Hardianto, C. D. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 29–37.
- Eka.Antriya,, I. P. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*. *Kajian Kebijakan Publik*, 1(1), 1–11.
- Dheby, C., Adys, A. K., & Idris, M. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 161-177.
- Isnaini,K.*Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 709-714
- Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Nugroho, S. C., & Mashur, D. *Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom)*

Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(2), 1-15.

Nurmayanti, S., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2018). *Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096-7106.

Sasmito, C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2.

Peraturan Perundang

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Internet

Kementerian Sosial Republik Indonesia “Program Keluarga Harapan (PKH)” <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>